

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MEMBERIKAN SOSIALISASI PENTINGNYA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN NUNUKAN

Oscar Parrangan¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu meliputi Mengenal sasaran Komunikasi, Pemilihan Komunikasi, Pesan Komunikasi (message), dan Peranan Komunikator Dalam Komunikasi.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Milles, Huberman dan Saldana.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan di Kabupaten nunukan sudah diterapkan dimensi Mengenal Sasaran Komunikasi, Pemilihan Media Komunikasi, Pesan Komunikasi (Message), Peranan Komunikator Dalam Komunikasi. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara Pemilihan Media Komunikasi belum berjalan dengan baik. (2) Faktor penghambat Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya dokumen Kependudukan di Kabupaten Nunukan adalah Topografi dimana Nunukan adalah sebuah pulau dan kecamatan-kecamatanannya berada di luar pulau nunukan yang susah dia jangkau sehingga membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama untuk kesana, dan tidak adanya jaringan radio dan koran yang sampai ke kecamatan-kecamatan nunukan sehingga sosialisasi menggunakan media massa terhambat.

Kata Kunci : Sosialisasi Komunikasi Pemerintahan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: oscarparrangan125@gmail.com

PENDAHULUAN

Aparatur pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik, semua harus paham tentang komunikasi pemerintahan namun tidak semuanya memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu melakukan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan bersama-sama masyarakat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan pihak lain secara ilegal (Hasan, 2010:24).

Seperti komunikasi pada umumnya, maka komunikasi pemerintahan menunjukkan proses pengiriman dan penerimaan pesan (*messages*) dari satu pihak kepada pihak lain melalui cara- cara dan saluran-saluran tertentu dengan harapan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan pesan yang diterima. Jadi tiap komunikasi pemerintahan adalah hasil dari proses rumit yang meliputi baik kognisi (*thinking*) dan perilaku (*doing*). Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat.

Dari pengamatan peneliti bahwasanya dengan adanya fenomena banyak warga perbatasan Nunukan belum memiliki dokumen kependudukan, membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mensukseskan program Kementrian dalam Negeri, sehingga program Kementiran dalam Negeri yaitu Percepatan Layanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el serta penerbitan Akta Kelahiran Agar dapat terlaksana dengan baik. Diperlukan peran dari semua pihak, khususnya para *stakeholders* (pemangku kepentingan) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan hingga ke pelosok desa agar berperan aktif untuk memberikan pemahaman pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan, seperti halnya melalui sosialisasi atau kegiatan-kegiatan komunikasi yang dapat di sampaikan melalui komunikasi personal maupun non personal seperti media massa, sehingga masyarakat yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Nunukan akan lebih mengetahui mengenai informasi-informasi yang coba di sampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar tujuan komunikasi pemerintahan dapat tercapai. Sehingga peneliti mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana komunikasi pemerintahn dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan.

Dari temuan awal ini maka peneliti mengangkat judul, Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan di Kabupaten Nunukan.

KERANGKA DASAR TEORI

Model S-M-C-R

Rumus S-M-C-R adalah singkatan dari istilah-istilah :S singkatan dari Source yang berarti sumber atau komunikator; M singkatan dari Message yang berarti pesan; C singkatan dari Channel yang berarti saluran atau media,

sedangkan R singkatan dari Receiver yang berarti penerima atau komunikan. (Effendy, 2003:256).

Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatus* yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian komunikasi menurut Lexicographer (ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan.

Menurut Hoveland, Janis dan Kelley dalam buku Marhaeni Fajar (2009:31) mendefinisikan komunikasi demikian: “*The process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify, the behavior of other individu.*” Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Pendapat lain diungkapkan oleh Sarah Trenholm dan Arthur Jensen mendefinisikan komunikasi demikian : “*A process by which a source transmits a message to a receiver through some channel.*” Komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran.

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan adalah, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan 2010). Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan.

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (*human communication*) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal.

Sosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto (2010:55) Sosialisasi adalah proses interaksi sosial yakni dasar sosial, merujuk pada hubungan - hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial terjadi karena masing – masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan – perubahan, sehingga menimbulkan kesan didalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan.

Sosialisasi mengandung arti penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif dalam masyarakat (Onong, 2005:27).

Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. surat keterangan kependudukan: dan
5. Akta Pencatatan Sipil.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai satu tujuan. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy,2003:301).

Demikian pula strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi..

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif kualitatif yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka, bersifat faktual, dan akurat tentang fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau objek tertentu. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2006:11).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah dimaksudkan untuk membatasi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam mengolah data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan (meleong, 2006:93).

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka peneliti ini memfokuskan pada gambaran Sosialisasi Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menentukan fokus penelitian ini, yaitu :

1. Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan di Kabupaten Nunukan, Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini difokuskan pada :
 - a. Mengenal sasaran komunikasi
 - b. Pemilihan media komunikasi

- c. Pesan komunikasi
- d. Peranan komunikator dalam komunikasi
2. Faktor penghambat komunikasi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.

Sumber data

1. Data Primer, diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.
2. Data Sekunder, untuk mengumpulkan data sekunder, penulis memperoleh dari artikel-artikel, sumber tertulis dan terutama sumber *online* sebagai data pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik atau cara-cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan dan riset kepustakaan mengenai sosialisasi politik KPU Kaltim.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yang dimaknai sebagai penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mencermati penyajian data ini, maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi melalui pengamatan dari data yang ada. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, peneliti berpegang pada data yang telah direduksi atau yang telah disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonom di wilayah Kalimantan bagian utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Seiring dengan perkembangannya, pembangunan di Kabupaten Nunukan menjadi sangat pesat dan telah memekarkan beberapa kecamatan baru. Pada tahun 2006 dua Kecamatan dimekarkan yaitu Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Krayan Selatan. Selanjutnya pada tahun 2008 dimekarkan lagi satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan Selatan. Tahun 2011 terjadi pemekaran yang cukup banyak, ada enam Kecamatan yang dimekarkan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Lumbis Ogong, dan Kecamatan Tulin Onsoi. Selanjutnya pada tahun 2012 kembali dilakukan pemekaran Kecamatan Sembakung Atulai. Sampai pada saat ini Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan berjumlah 16 Kecamatan.

Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2003 terjadi perubahan srtuktur menjadi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya pada tahun 2008 terjadi perubahan struktur dan nomenklatur dari Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagai tindak lanjut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan Keluarga Berencana Daerah memisahkan diri dan bergabung dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2008.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terletak di jalan Pangeran Antasari Kecamatan Nunukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan khususnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembahasan

Untuk membahas hasil penelitian yang peneliti uraikan dalam penelitian ini, maka data dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti melalui narasumber yang diambil akan dianalisa dan dibahas dari setiap fokus yang merupakan pokok dari penelitian ini.

Komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan adalah cara dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengenali sasaran komunikasi, pemilihan media komunikasi, pesan komunikasi (*message*) dan peranan komunikator dalam komunikasi, yang digunakan peneliti untuk menganalisa komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan.

Komunikasi pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan

Mengenali sasaran komunikasi

Mengenali sasaran komunikasi adalah upaya komunikator untuk mengetahui kondisi komunikan. Dengan perumusan tujuan yang jelas, komunikator juga harus memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Demikian halnya dengan komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis menganalisa bahwa dari segi sasaran komunikasi maka yang menjadi permasalahan adalah masih adanya masyarakat di Kabupaten Nunukan yang belum memiliki dokumen kependudukan, masyarakat kabupaten nunukan yang belum memiliki dokumen kependudukan banyak tersebar di daerah pedalaman kabupaten nunukan seperti Kecamatan Krayan, Sembakung, Lumbis, Sei Menggaris, Sebuku.

Mengenai mengenali sasaran komunikasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadikan masyarakat kabupaten nunukan sebagai sasaran pada komunikasi ini, khususnya masyarakat yang belum tahu pentingnya dokumen kependudukan dan masyarakat yang berada didaerah pedalaman kabupaten nunukan yang masih belum memiliki dokumen kependudukan, karena komunikator ingin memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan secara merata diseluruh kabupaten nunukan, sehingga masyarakat kabupaten tahu akan pentingnya dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Memperoleh dokumen kependudukan merupakan hak setiap penduduk seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 2.

Pemilihan media komunikasi

Media komunikasi adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Media tersebut dipilih dan disesuaikan dengan tujuan dari komunikator untuk menyampaikan pesan kepada khalayak yang menjadi sasaran

Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Oscar P) dalam komunikasi. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat melihat, membaca dan mendengarnya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan dilapangan, maka dapat di lihat bahwa, dalam sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki dua cara dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat di kabupaten nunukan yaitu:

1. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer terjadi apabila pihak yang mengadakan hubungan bertemu dan bertatap muka secara langsung. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan melakukan sosialisasi langsung atau tatap muka dengan masyarakat, dimana sosialisasi secara langsung dilakukan di daerah pedalaman yang ada di kabupaten nunukan, yagn mana kita tahu bahwa di daerah pedalaman kabupaten nunukan tidak adanya signal radio dan koran juga belum menjangkau daerah pedalaman yang ada di kabupaten nunukan.

2. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi yang terjadi dengan menggunakan perantara. Seperti menggunakan orang lain sebagai perantara, telepon, telegram, surat, dan lain-lain. Dinas kependudukan menggunakan media massa untuk melakukan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan yaitu untuk masyarakat diderah yang sudah mendapatkan signal radio dan sudah di jangkau koran, media massa yang digunakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah Surat kabar kaltara, Radio Republik indonesia, dan brosur yang dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Nunukan, sosialisasi menggunakan media massa sudah dilakukan sejak tahun 2012 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pemilihan media ini sudah baik dimana yang kita tahu bahwa Kabupaten Nunukan itu kondisi demografinya yang tidak satu hamparan atau terbagi tidak satu pulau dan susah untuk di jangkau, dan masih banyak daerah di Kabupaten Nunukan masih tertinggal susahnya listrik dan jaringan, sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan memilih untuk di daerah ibukota Kabupaten Nunukan melakukan sosialisasi menggunakan media seperti radio dan surat kabar, dan untuk daerah kecamatan yang susah di jangkau dinas kependudukan melakukan sosialisasi deng cara tatap muka langsung dengan masyarakat.

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan diakses secara massal pula. Komunikasi massa adalah komunikasi umum bukan bersifat pribadi, pesan yang disampaikan bukan ditujukan kepada satu orang saja karena isinya bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat.

Komunikasi massa tak akan lepas dari massa, karena dalam komunikasi massa, penyampaian pesannya adalah melalui media”(McQuail 2005:3) menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.

Pesan Komunikasi

Semua pesan yang disampaikan mempunyai tujuan tertentu, baik itu sebagai informasi ataupun persuasi. Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang. Di dalam sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan. Komunikator menggunakan teknik persuasi dalam proses penyampaian pesan. Khalayak secara tidak langsung diajak untuk mengetahui pentingnya dokumen kependudukan, persyaratan, dan prosedur- prosedur dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, maka dapat dilihat bahwa pesan komunikasi yang disampaikan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yaitu pesan mengajak masyarakat untuk tertib dokumen kependudukan yang mana kita ketahui bahwa dokumen kependudukan itu wajib dimiliki oleh setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali, agar memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam proses administrasi. Pesan- pesan dalam sosialisasi juga dibuat sederhana agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat.

Pesan yang disampaikan melalui media massa seperti koran, radio, dan brosur telah dibuat semenarik mungkin oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil agar para pendengar dan pembaca lebih tertarik dengan pesan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan yang disampaikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan.

Dalam melakukan sosialisai dinas kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan bahasa indonesia dan tidak ada masalah, karen rata- rata masyarakat dikabupaten nunukan sudah menggunakan bahasa indonesia, sehingga tidak ada kendala dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melakukan sosialisasi langsung atau tatap muka kepada masyarakat yang ada dipedalaman kabupaten nunukan.

Menurut Hoveland, Janis dan Kelley dalam buku Marhaeni Fajar (2009:31) mendefinisikan komunikasi demikian: *“The process by which an individual (the communicator) transmits stimult (usually verbal symbols) to modify, the behavior of other individu.”* Komunikasi pemerintahan adalah, penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Hasan 2010:5).

Peranan komunikator dalam komunikasi

Dalam proses komunikasi, komunikator adalah sumber pertama dari komunikasi tersebut. Dengan kata lain komunikator mencoba untuk berkomunikasi yang ditujukan pada masyarakat yang relatif luas, sifatnya heterogen, dan anonim, pesan-pesannya disampaikan secara umum.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dapat dilihat bahwa peranan komunikator dalam komunikasi sudah cukup baik, karena tidak terdapat keluhan dari masyarakat, selain itu seluruh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga bisa dan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Narasumber dalam sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan, dan apabila kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak bisa atau berhalangan hadir maka kepala dinas diwakili oleh staff nya, yang ditunjuk langsung oleh kepala

Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Oscar P) dinas, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak memiliki tim khusus untuk melakukan sosialisasi ini. Sistem sosial budaya.

Komunikator sebagai penyampai informasi akan memberikan sajian informasi yang besar maknanya bagi penerima pesan atau komunikan. Daya tarik sumber dan kredibilitas sumber adalah faktor penting yang ada pada diri komunikator pada saat melakukan komunikasi. Komunikator akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme yang ada pada diri seorang komunikator. Begitu halnya komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan

Terdapat empat kondisi yang harus dikuasai oleh komunikator pemerintahan dalam menyampaikan pesan, antara lain sebagai berikut (Hasan, 2010:28):

1. Keterampilan.

Keterampilan kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Dalam melakukan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nunukan terampil dalam memberikan sosialisasi sehingga masyarakat dapat menerima informasi dari sosialisasi dengan jelas.

2. Sikap.

Sikap adalah reaksi atau respons yang masih tertutup dan seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dalam melakukan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan narasumber dalam memberikan sosialisasi bersikap baik dan sopan kepada masyarakat.

3. Pengetahuan.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Narasumber dalam sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan menguasai materi, sehingga masyarakat di kabupaten nunukan mengetahui dengan jelas materi yang disampaikan oleh pemateri.

4. Sistem sosial budaya.

Sistem sosial budaya merupakan suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, falsafah Negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjadi asa untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yang ada. Dalam melakukan sosialisasi dinas kependudukan menggunakan menggunakan bahasa indonesai, tetapi masih ada masyarakat dikabupaten nunukan yang belum terlalu mengerti bahasa Indonesia khususnya masyarakat didaerah pedalaman.

Faktor Penghambat Komunikasi Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Memberikan Sosialisasi Pentingnya Dokumen Kependudukan di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan beberapa faktor penghambat sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan yang diantaranya adalah :

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingginya tingkat kesadaran seseorang salah satunya dipengaruhi tingkat pendidikan yang telah ditempuh, yang membentuk pola pikir dan nilai-nilai budaya dalam dirinya yang terkadang menjadi penghambat dalam proses kegiatan yang dilakukan. Minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai objek dari sosialisasi tersebut menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan dari sosialisasi itu sendiri. Minimnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai objek dari peraturan tersebut menyebabkan terhambatnya pencapaian dari tujuan peraturan tersebut, selain itu peringatan yang diberikan dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga kurang tegas, sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi masyarakat untuk mengulangi kesalahan yang sama.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Dan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dilihat yang menjadi hambatan terdapat banyak hambatan yang di hadapi dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu terkendala anggaran, dengan terbatasnya anggaran maka mereka memangkas biaya untuk sosialisasi, juga sering padamnya listrik, jaringan, dan dinas kependudukan juga sering kehabisan blangko.

3. Topografi

Topografi merupakan salah satu hambatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan. Dapat di simpulkan bahwa topografi menjadi kendala utama dalam melakukan sosialisasi karena transportasi yang mahal dan juga terkendala biaya sehingga dalam melakukan sosialisasi yang di lakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kurang maksimal sehingga komunikasi pemerintahan tidak tersampaikan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah peneliti kemukakan mengenai komunikasi pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen

kependudukan, yang meliputi :

- a Mengenai Sasaran Komunikasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menjadikan masyarakat Kabupaten Nunukan sebagai sasaran komunikasi khususnya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan masyarakat yang berada di daerah pedalaman Kabupaten Nunukan.
 - b Pemilihan Media Komunikasi, mengenai pemilihan media komunikasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten nunukan menggunakan dua cara yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media massa.
 - c Pesan Komunikasi (*message*), menyangkut pesan komunikasi dalam sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan sudah baik, yaitu pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - d Peranan Komunikator dalam Komunikasi, Mengenai peranan komunikator dalam komunikasi dapat dikatakan sudah baik, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mampu memberikan sosialisai dengan baik kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat komunikasi pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan yaitu :
- a Masih kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Nunukan akan pentingnya dokumen kependudukan.
 - b Terkendala dalam srana dan prasarana Seperti sering mati lampu didaerah kabupaten nunukan sehingga sering terhabatnya sosialisasi dokumen kependudukan dan pembuatan dokumen kependudukan.
 - c Topografi yang mengakibatkan susahnya masyarakat yang ada di pedalam untuk membuat dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan karena jarak yang cukup jauh untuk datang ke kabupaten nunukan dan pesan yang disampaikan dinas kependudukan melalui media massa tidak tersampaikan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian tentang komunikasi pemerintahan dinas kependudukan dan pencataan sipil dalam memberikan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan :

1. Saran untuk Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil agar kegiatan komunikasi pemerintahan melalui sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dapat berlangsung terus menerus sehingga masyarakat akan paham tentang pentingnya dokumen kependudukan.
2. Diharapkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dalam melakukan komunikasi pemerintahan dapat melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam dalam mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan di Kabupaten Nunukan sehingga komunikasi pemerintahan dapat tersampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Cangara, Hafied. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi*. Bandung PT.Citra Aditya Bakti
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Edvinsson, L. and M. Malone. 1997. *Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower*. HarperCollins, New York, NY.
- Fajar, Marhaeni, *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Hasan, Erliana, M.Si. *Komunikasi Pemerintahan*, 2010. Refika Aditama. PT. Refika Aditama.
- Miles, Mathew. B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya.
- Ruslan, Rosady, 2006. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Manajemen Publik Relations & Media Komunikasi, Konsep & Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.Cetakan Kesepuluh.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi* (edisi ketiga). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen:

- Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ Tentang *Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.

Sumber Internet :

- <http://dukcapil.kemendagri.go.id/>